

TAJUK RENCANA

Pemanfaatan Tanah Kalurahan

PEMERINTAH Daerah DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, yang berlaku mulai 7 Mei 2024. Menurut Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disperparu) DIY, Adi Bayu Kristanto, Pergub tersebut untuk menggantikan Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Tanah kalurahan dimaksud merupakan bagian dari Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang selama ini dimanfaatkan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pergub tersebut tentunya akan mendukung percepatan mewujudkan visi Gubernur DIY 2022-2027, yakni Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Misi pertamanya adalah, Mereformasi kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Reformasi Kalurahan dimaksud agar kalurahan di DIY menjadi pusat pengembangan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya.

Reformasi Kalurahan mempunyai arti sangat penting bagi 348 kalurahan/kelurahan di DIY, yang terdiri 392 kalurahan dan 46 kalurahan. Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, jika potensi keunggulan yang ada di kalurahan dilancarkan, maka kalurahan akan menjadi sentra pertumbuhan sekaligus menjadi ujung depan pemerantasan kemiskinan.

Karena itu, Pemda DIY berkomitmen mewujudkan kalurahan sebagai pusat pengembangan berbagai potensi, khususnya untuk mewujudkan kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur DIY juga mengungkapkan, tanah kas de-

sa bisa dimanfaatkan menggunakan dana. Hal itu dimaksud agar pengembangan usaha pertanian dapat mendukung peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sekaligus sebagai solusi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial dan permasalahan yang terjadi di kalurahan.

Agar pemanfaatan tanah kalurahan dan dilakukan secara maksimal, tentunya perlu adanya dukungan kapasitas pamong kalurahan yang mumpuni. Untuk itu, Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY juga telah menyusun pedoman baku standar kompetensi dan kebutuhan pelatihan peningkatan kecakapan pelaksanaan tugas dan fungsi pamong kalurahan.

Menurut Kepala Biro Tapem Setda DIY, KPH Yudanegara, ke depan perlu ada kesamaan persepsi antara Pemda DIY, pemerintah pusat, akademisi, pawayitan, pamong, serta pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan. Persamaan persepsi dinilai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Kalurahan dari sisi penguatan kapasitas SDM Pemerintah Kalurahan.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024, mestinya pemanfaatan tanah kalurahan yang didukung standar kualifikasi pamong kalurahan akan benar-benar berperan besar dalam peningkatan kesejahteraan, pencegahan stunting, dan pemerantasan kemiskinan.

Dengan demikian, optimisme Sri Sultan Hamengku Buwono X dapat segera terwujud, bahwa kalurahan bisa menjadi pondasi kemandirian masyarakat. REformasi Kalurahan juga dapat dimaknai sebagai konsep kemandirian kalurahan dengan meningkatkan partisipasi warga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi. Keberadaan Pergub Nomor 24 Tahun 2024, tentunya mendukung mewujudkan kalurahan sebagai ruang hidup yang layak dan bermartabat bagi semua warganya. □-d

Menebak Kabinet Prabowo

BANGSA kita tengah menunggu terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 yang lazim disebut Kabinet. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah mengotak-atik nama-nama yang akan dimasukkan dalam susunan kabinet. Pengangkatan seorang menteri merupakan kewenangan penuh dari Presiden, sesuai pasal 17 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi 'Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden'. Jadi seperti apa format dan komposisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga negara dalam pemerintahan presidensial sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

Menyusun kabinet bukanlah pekerjaan mudah. Lebih-lebih kabinet periode 2024-2029 ini. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan Prabowo-Gibran, mengingat hebohnya "drama" menjelang, pada saat, dan pasca pencoblosan. Publik sebenarnya percaya penuh kepada Prabowo-Gibran. Tak menyoal format dan komposisi Kabinet seperti apa. Mau model "kabinet zaken" (menteri-menterinya berasal dari ahli atau profesional), kabinet akomodatif, campuran, atau bisa disebut kabinet gado-gado, itu semua menjadi hak prerogatif presiden terpilih. Tugas rakyat setelah memilih, sesudah dinyatakan pemenangnya sudah selesai. Mandat telah diberikan sambil berharap agar kabinet yang disusun dapat memenuhi harapan rakyat. Hiruk pikuk keramaian, sebenarnya hanya di media massa dan media sosial. Mereka menebak-nebak figur-figur yang akan duduk di kabinet, jumlah dan komposisi menteri, jatah masing-masing parpol, dan seterusnya.

Sebelumnya juga ramai diperbincangkan di publik, parpol mana saja yang akan masuk di pemerintahan. Apakah hanya dari parpol pendukung pasangan 02 (Prabowo-Gibran), atautah ada parpol dari pendukung 01 (Anies -Muhaimin) dan 03 (Ganjar-Mahfud) yang akan diakomodasi. Berapa persentase jatah menteri masing-masing parpol, berapa perbandingan antara menteri profesional dan dari parpol, perimbangan antardaerah, suku, golongan, agama, dan sebagainya.

Upah dan Bargaining

Terlepas dari ramainya isu di luar, memang bisa dibayangkan betapa sulit Prabowo-Gibran meramu komposisi kabinetnya, mengingat sukses pasang-

Imam Anshori Saleh

an 02 dalam memenangi pemilihan presiden Februari lalu berkat dukungan banyak pihak, antara lain parpol, ormas, komunitas, dan tokoh-tokoh. Ketika kemudian pasangan calon 02 terpilih wajar semua pendukung ingin mendapatkan bagian secara proporsional. Itu bagian dari "upah" jerih payah mereka. Bukan hanya parpol dan ormas, para tokoh yang berada di barisan Prabowo-Gibran juga berhak mendapatkan insentif yang sepadan. Belum la-



KE-JOKO SANTOSO

gi kalau parpol-parpol pendukung pasangan 01 dan 03 juga ikut bergabung.

Wajar jika sampai hari ini belum tebak format dan komposisi Kabinet Prabowo-Gibran. Kalaupun di media massa dan media sosial sudah bermunculan "Susunan Kabinet" bisa dipastikan semua itu hanya tebak-tebakan atau "utak-atik". Atau mungkin juga bagian dari "cek ombak" oleh timnya Prabowo-Gibran sendiri. Tentu nama-nama yang disebutkan dalam "Susunan Kabinet" itu nantinya ada yang benar masuk, karena "utak-atik" itu juga disertai alasan-alasan rasional. Misalnya dengan mendasarkan pada bobot kontribusi suara yang diberikan parpol, atau bisa jadi sebelum pilpres sudah ada "akad" antara Prabowo dengan parpol pendukungnya. Misalnya dengan partai-partai Golkar, PAN dan Demokrat. Di luar itu masih ada partai-partai nonparlemen seperti PBB, Partai Gelora, dan PSI.

Bisa jadi bargaining juga terjadi antara Prabowo dan Jokowi jauh sebelum

pilpres. Presiden Joko Widodo meskipun sebenarnya tidak mempunyai kewenangan apa-apa dalam penyusunan kabinet tapi diperkirakan ikut mewarnai. Setidaknya Jokowi dapat imenitipkan beberapa nama untuk jabatan menteri, wakil menteri atau jabatan strategis lainnya. Prabowo dan Gibran sulit menolak titipan-titipan itu, mengingat hubungan yang sangat erat antara Prabowo dan Jokowi. Semua mengetahui kemenangan besar Prabowo-Gibran dalam pilpres kemarin tidak terlepas dari andil besar Jokowi.

Saking banyaknya kepentingan dan etipitanyang mesti diakomodasikan kemudian memunculkan wacana akan adanya penambahan jumlah menteri di pemerintahan baru nanti. Wacana "kabinet gemuk" pun sudah ramai dikritisi para pengamat dan akademisi. Karena dari pengalaman selama ini "kabinet gemuk" membuat pemerintahan lamban bergerak. Hal itu akan menyulitkan Prabowo dalam menjalankan program kerjanya untuk mewujudkan misi keberlanjutan yang sudah dijanjikan kepada rakyat.

Prabowo juga mesti mempertimbangkan integritas, kapasitas, dan rekam jejak personel menteri-menterinya, agar kabinet yang terbentuk kelak tidak perlu bongkar pasang atau reshuffle seperti yang terjadi di kabinet-kabinet sebelumnya. Tentu saja hal ini diperlukan kejujuran para pimpinan parpol atau ormas yang memasok para calonnya. Dari tebak-tebakan kabinet Prabowo-Gibran itu, komposisi nama bisa saja salah. Agaknya yang tidak meleset adalah terbentuknya kabinet gemuk dan gado-gado. Kita tunggu penuh harap kabinet baru itu setelah pelantikan Presiden 20 Oktober nanti. □-d

**) Dr. Imam Anshori Saleh, SH, MH, Anggota DPR RI 2004-2009, Wakil Ketua Komisi Yudisial RI 2010-2015.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.
Direktur Umum: Yurinya Nugroho Samawi SE MM MSc.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. General Manager : H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfi MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakil. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salaman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com. Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Zaba Harjaja.

Wartawan: H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

107 TAHUN AISYIYAH:

Mengokohkan dan Memperluas Dakwah Kemanusiaan Semesta

GERAK langkah Aisyiyah telah dimulai sejak awal Muhammadiyah didirikan, dalam prespektif Kiai Dahlan perempuan harus berperan dalam horizon yang lebih luas agar dapat keluar dari keterkungkungan ranah domestik. Aisyiyah secara resmi didirikan pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917.

Memasuki usia ke-107 tahun, gerakan Aisyiyah tumbuh menjadi gerakan perempuan yang melampaui zamannya. Apa yang diperjuangkan Kiai Dahlan serta Nyai Dahlan telah menampakkan hasil yang nyata, terutama dalam memperjuangkan kesetaraan bahwa perempuan memiliki hak partisipasi yang sepadan dengan kaum laki-laki dalam ranah apapun.

Saat ini Aisyiyah telah memiliki amal usaha bidang pendidikan, mulai dari kelompok bermain, taman pengasuhan anak, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, serta perguruan tinggi. Aisyiyah juga memiliki amal usaha di bidang kesehatan berupa rumah bersalin, badan kesehatan ibu dan anak. Di bidang kesejahteraan sosial memiliki rumah singhah anak jalanan dan panti asuhan. Sampai saat ini tercatat tidak kurang dari 22.000 TK ABA yang telah dikelola Aisyiyah, amal usaha Aisyiyah tersebut tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Dakwah Kemanusiaan

Pada Mukhtamar 1 Abad 2015 di Makassar, Aiyiyah telah merumuskan visi gerakannya yang megagaskan, Pertama: Berkembangnya Islam berkemajuan dalam kehidupan masyarakat khususnya umat Islam di mana Aisyiyah berada, Kedua : berkembangnya gerakan pencerahan yang membawa proses pembebasan, pemberdayaan, dan pemajuan dalam kehidupan keummatan dan kebangsaan, Ketiga : berkembangnya perempuan berkemajuan di lingkungan umat Islam dan bangsa Indonesia maupun ranah global sebagai insan pelaku perubahan menuju peradaban utama yang cerah mencerahkan.

Alfian Dj

Pada Milad ke-107 Aisyiyah merasa perlu untuk terus menggelorakan semangat dakwah kemanusiaan dengan mengangkat tema "Mengokohkan dan Memperluas Dakwah Kemanusiaan Semesta". Gerakan dakwah kemanusiaan yang dimiliki Aisyiyah merupakan bagian dari implementasi *Teologi Al Maun* yang menebarkan Islam *rahmatan lil'alam*.

Aisyiyah menegaskan, saat ini 1 dari 10 perempuan di dunia masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem, baik itu menyangkut akses pada makanan, pekerjaan yang layak maupun pendidikan. Semua itu harus mendapatkan perhatian serta diselesaikan dengan pendekatan multidimensi. Di samping itu persoalan kemanusiaan yang timbul akibat peperangan, konflik bersenjata juga telah menimbulkan banyak korban, terutama pada kalangan anak-anak dan ibu, baik korban kematian maupun dampak lain seperti minimnya pasokan makanan yang ikut memicu timbulnya gizi buruk pada anak serta persoalan kesehatan lainnya pada ibu menyusui serta ibu hamil.

Dakwah kemanusiaan Aisyiyah juga menaruh perhatian besar pada advokasi konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan negara, Aisyiyah menyatakan konflik tersebut perlu diselesaikan dengan adil dan memanusiakan warga negara dengan pendekatan HAM. Hal itu perlu terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak hidup secara aman dan terlindungi secara hukum.

Milad Aisyiyah ke-107 merupakan momentum bagi

Aisyiyah untuk terus menguatkan komitmennya melakukan dakwah pencerahan yang bercirikan dakwah yang membebaskan, (*tahrir*), dakwah yang memberdayakan (*taqwiyah*), serta dakwah yang memajukan (*taqdi*).

Sebagai bagian dari gerakan dakwah semesta, Aisyiyah melalui program EcoBhineka Muhammadiyah terus melakukan edukasi pada kalangan muda untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga serta mempunyai keberpihakan pada usaha usaha pelestarian dan penyelamatan lingkungan.

Semua kita menaruh harapan yang besar pada gerakan Aisyiyah, Gerakan yang mempunyai modal sosial yang telah terbangun lebih dari satu abad ini akan semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua kalangan. Gerakan Aisyiyah senantiasa memberi solusi nyata terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. □-d

**) Alfian Dj, Pengajar Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan Sekretaris Majelis Hukum HAM PP Muhammadiyah.*

Pojok KR

KPK sita rumah mewah tersangka kasus korupsi timah dan rumah mantan Menteri Pertanian SYL.

-- Sama-sama mewah.

Jusuf Kalla bingung, mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan jadi tersangka korupsi.

-- Karena Karen?

Mensos sarankan Pemprov Sumatera Barat meniru mitigasi Gunung Merapi.

- Mitigasi tiruan.

Beraksi